

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunitas adat terpencil secara operasional sebagaimana terminologi yang dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia (2004 : 11) didefinisikan sebagai kelompok sosial budaya yang bersifat lokal, relatif kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpencar dan berpindah-pindah ataupun menetap kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, pada kondisi geografis yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumber daya alam setempat dengan teknologi yang masih sederhana dan ekonomi subsisten serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar. Terminologi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran tentang kondisi keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan, dan keterasingan yang pada akhirnya menyebabkan mereka terbelenggu dalam kemiskinan. Jangankan untuk menikmati pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, misalnya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mereka harus berjuang mengolah alam agar dapat hidup layak sebagaimana komunitas lainnya, walaupun dalam kondisi serba keterbatasan dan kesederhanaannya.

Secara kualitatif menurut Direktorat Pemberdayaan KAT Republik Indonesia (2004 : 2), masalah-masalah yang dialami warga KAT tidak terlepas dari hambatan fungsi sosial, hambatan fisik, geografis, ilmu pengetahuan (karena kurang/terbatasnya informasi), hambatan keterampilan (mereka masih menggunakan teknologi sederhana/tradisional dan belum mengenal teknologi modern dan budidaya), serta keterpencilan terhadap akses/fasilitas pelayanan sosial dasar atau pelayanan publik lainnya sehingga KAT tidak dapat mencapai taraf hidup dan kesejahteraan yang memadai. Singkatnya, secara mendasar, permasalahan yang dialami oleh warga komunitas adat terpencil tidak lepas dari masalah kemiskinan. Jika

dibandingkan dengan warga masyarakat Indonesia pada umumnya, kondisi kehidupan dan penghidupan mereka relatif tertinggal.

Untuk mengatasi hal tersebut menurut Direktorat Pemberdayaan KAT Republik Indonesia (2004 : 2), diperlukan upaya pemberdayaan sekaligus perlindungan sosial khusus (*special protection measures*) dalam bentuk bantuan kesejahteraan sosial, baik bantuan kesejahteraan sosial yang sifatnya darurat maupun bantuan kesejahteraan sosial yang bersifat tetap/permanen serta pemberian pelayanan sosial dasar sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara (*state obligation*) dalam menjamin terpenuhinya hak dasar warganya yang tidak mampu, miskin dan marginal.

Hal ini sebagaimana amanat konstitusi yang diakui bersama dalam UUD 1945, pemerintah (wajib) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum (*preamble*), hal ini kemudian dipertegas kembali dalam uraian per pasal di dalam UUD 1945, bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (pasal 34 ayat 2), setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (pasal 28H ayat 1), setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (pasal 28 H ayat 2), setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (pasal 28H ayat 3), setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (pasal 28I ayat 2), dan sebagainya. Intinya bahwa, komunitas adat terpencil adalah warga negara Indonesia juga yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan dilindungi konsitusi agar dapat menjadi bagian yang sama dalam proses berbangsa dan bernegara guna mencapai kesejahteraan, lahir dan bathin.

Perlindungan tersebut juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya pasal 5 ayat 2 huruf (a) yang menegaskan konsepsi dasar komunitas adat terpencil dimaknai sebagai keterpencilan. Karenanya, komunitas ini menjadi salah satu sasaran strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Direktorat Pemberdayaan KAT, 2009 : 1).

Selain kondisi tersebut, masuknya komunitas adat terpencil sebagai sasaran strategis pembangunan juga dilatarbelakangi oleh perkembangan isu global, diantaranya : Kesepakatan tentang *Declaration of Human Right*, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial dan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) menyangkut isu tentang *indigeneous people* yang belum diratifikasi Pemerintah Indonesia, selain itu, *environment scarcity*, yakni kenyataan terdesaknya komunitas adat terpencil karena perambahan hutan lingkungan permukiman mereka untuk kepentingan pembangunan, masalah integrasi nasional, dimana termarginalisasinya kehidupan komunitas adat terpencil dalam pembangunan nasional merupakan kondisi rentan terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, serta integrasi bangsa (khususnya komunitas adat terpencil di daerah perbatasan dan rawan konflik), terakhir menyangkut nilai-nilai kearifan, dimana pada setiap kehidupan sosial budaya komunitas adat terpencil terdapat nilai-nilai kearifan yang merupakan potensi yang dapat dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan (Dinas Kessos Prov. Kalsel, 2008 : 9-10).

Hal ini menjadi kerangka dasar bagi pemerintah selaku institusi yang disertai mandat oleh konstitusi agar dengan kewenangan yang dimiliki mampu mengeluarkan kebijakan yang adil dan mensejahterakan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali bagi komunitas adat terpencil, dan pemberdayaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan

pemerintah untuk mensejajarkan komunitas adat terpencil bersama-sama komunitas lainnya di Indonesia dalam kerangka mencapai kesejahteraan, lahir dan bathin.

Dengan cara tersebut menurut Budiman (2007 : 16) pemerintah berusaha mempertahankan pembangunan sebagai sebuah upaya sistematis untuk melakukan perubahan sosial, sambil pada saat yang sama berusaha menciptakan impresi bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan pengabaian keragaman kultural lokal. Artinya, pembangunan tetap menjadi satu-satunya pilihan dan tidak ada alternatif lain di luar itu. Juga menjadi jelas bahwa komunitas adat terpencil merupakan derivasi konseptual dari terma "*indigenous people*" yang berlaku dalam politik internasional dan bahwa teleologi pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia juga harus berkompromi dengan tekanan global.

Pilihan pembangunan yang menjadi pilihan pemerintah pada komunitas adat terpencil adalah untuk memberdayakan komunitas ini dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya agar mereka dapat hidup secara wajar, baik jasmani, rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat.

Pilihan pemberdayaan menjadi strategis, menurut Nurjannah (2007 : 79) karena istilah pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) tersebut merupakan bentuk penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Dalam pandangan lain sebagaimana dikemukakan Biestek dalam Adi (2008 : 78) pemberdayaan yang dalam ilmu kesejahteraan sosial dikenal dengan "*self determination*", yang mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Sementara itu konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat menurut Hikmat (2006 : 3) selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan, sehingga pemberdayaan masyarakat menurut Khambali dalam Nurjannah (2007 : 79) pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, terutama yang pada saat sekarang sedang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang berarti memberdayakan adalah membantu seseorang/masyarakat menemukan kemampuan menuju kemandirian.

Dalam konteks komunitas adat terpencil, hal tersebut ditempuh melalui pendekatan tri daya, yaitu daya manusia, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya lingkungan, melalui penataan sistem lingkungan yang mampu menjamin warga komunitas adat terpencil mampu meningkatkan mutu hidup, terlindunginya hak dasar dan terpeliharanya budaya lokal sebagai salah satu unsur kearifan lokal, dan daya usaha, lebih berkaitan erat dengan penataan sumber-sumber ekonomi yang mampu menjamin warga komunitas adat terpencil terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga daya tersebut merupakan satu kesatuan dan proses pemberdayaan komunitas adat terpencil (Direktorat Pemberdayaan KAT RI, 2009 : 2)

Walaupun sejak tahun 1973 program pemberdayaan ini telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mensejajarkan komunitas ini dengan komunitas lainnya di Indonesia sehingga diharapkan mereka dapat hidup sejahtera, faktanya hingga tahun 2007, komunitas adat terpencil yang belum diberdayakan masih relatif cukup besar. Menurut data Direktorat Pemberdayaan KAT RI (2007) populasi KAT di Indonesia pada tahun 2007 tercatat sebanyak 229, 479 kepala keluarga (KK), komunitas ini tersebar di 30 provinsi. Dari jumlah tersebut, yang telah diberdayakan 73.609 KK, yang sedang diberdayakan sebanyak 12,425 KK, dan komunitas adat terpencil yang belum diberdayakan sampai dengan tahun 2007 mencapai 153.535 KK (rata-rata 1 KK : 4 jiwa). Fakta ini menunjukkan bahwa proporsi KAT yang belum

ditangani masih relatif besar (66,91%) dibandingkan dengan yang telah diberdayakan (32,08%) dan sedang diberdayakan (5,41%).

Di Kalimantan Selatan kondisi tahun 2008 berdasarkan pemetaan sosial tahun 2007 komunitas adat terpencil yang ada di daerah tersebut tercatat 9274 KK yang tersebar di 9 kabupaten, 27 kecamatan, dan 54 desa, sementara yang sudah diberdayakan berjumlah 3.456 KK (37,27%) di 47 lokasi, yang sedang diberdayakan 257 KK (2,77%) di 5 lokasi, dan yang belum diberdayakan sebanyak 5.561 KK (59,96%) dan tersebar di 49 lokasi (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 2008 : 6).

Khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu dari 9 kabupaten sebagaimana tersebut di atas memiliki komunitas adat terpencil sebanyak 966 KK (10,42%), yang tersebar di 4 kecamatan dan 10 desa. Dari jumlah tersebut, yang sudah diberdayakan sebanyak 635 KK (65,73%) di 8 lokasi, yang belum diberdayakan sebanyak 331 KK (34,27%) di 3 lokasi. Artinya, secara statistik di daerah otonom ini komunitas adat terpencil yang telah diberdayakan relatif lebih banyak. Terakhir pemberdayaan KAT yang dianggap relatif berhasil adalah yang dilakukan tahun 2005 sampai dengan 2007 berlokasi di Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan telah mencapai "bina purna" dan kewenangannya telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan pembinaan lanjutan, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, semenjak akhir tahun 2007 hingga sekarang (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 2008 : 6).

Melihat kondisi real komunitas adat terpencil yang terbelenggu keterasingan, keterisolasian, ketertinggalan dan kemiskinan, baik secara ekonomi maupun sosial, maka pemberdayaan dalam perspektif penguatan komunitas adalah menjadi fokus utama dalam pemberdayaan. Salah satu penguatan yang dianggap paling strategis dalam pemberdayaan tersebut adalah penguatan ekonomi komunitas adat terpencil. Penguatan ekonomi tersebut merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil, selain penataan perumahan dan

permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, pendidikan dan kesehatan (Ditjen. Pemberdayaan KAT, 2002 : 16-18).

Bentuk kongkrit penguatan ekonomi komunitas adat terpencil tersebut berupa usaha ekonomi produktif. Menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor. Per-19/PB/2005 usaha ekonomi produktif merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Secara aplikasi, khusus dalam kaitannya dengan pemberdayaan komunitas adat terpencil yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki komunitas adat terpencil di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut selama tahun 2007-2008 telah melakukan penguatan ekonomi melalui usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara, yang secara institusi dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan. Pelaksanaan usaha ekonomi produktif itu sendiri dalam tataran operasional, sebagaimana prosedur yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan program tersebut ditempuh melalui : persiapan dan pelaksanaan, yang didalamnya terdiri atas : sosialisasi, pembentukan kelompok, pelaksanaan usaha, dan administrasi pengelolaan usaha. Dalam perkembangan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tersebut sangat tergantung berbagai faktor, baik yang mendukung (kekuatan) maupun yang menghambat (kelemahan) sehingga usaha tersebut berkembang/tidak berkembang, baik aset, pendapatan, jenis usaha maupun kesejahteraan anggota dan kelompoknya, dampak yang terjadi dengan adanya pelaksanaan usaha ekonomi produktif tersebut bisa langsung (secara ekonomi maupun sosial) maupun tidak langsung (pada kondisi lingkungan),

bisa berdampak positif (bernilai baik) maupun negatif (bernilai buruk) bagi kehidupan komunitas adat terpencil.

Namun dalam perkembangannya sebagaimana laporan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2009), pelaksanaan usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara tersebut tidak mengalami kemajuan yang berarti, bahkan untuk tahun 2007 sudah tidak lagi melakukan aktivitas usahanya, sementara untuk tahun 2008 belum diketahui perkembangan usaha kelompok sasaran yang melaksanakan usaha ekonomi produktif tersebut.

Mengingat begitu strategisnya usaha ekonomi produktif dalam upaya penguatan ekonomi komunitas adat terpencil, khususnya untuk mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan tersebut, sementara fakta juga menunjukkan bahwa di lapangan justru usaha ekonomi produktif yang dilakukan kelompok sasaran terhenti dan tidak diketahui perkembangannya. Untuk itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui kondisi obyektif pelaksanaan, faktor pendukung/penghambat dan dampak usaha ekonomi produktif bagi kelompok sasaran pada komunitas adat terpencil tersebut.

Walaupun terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik usaha ekonomi produktif (UEP), diantaranya Lubis (2004) dan Ichsan (2004), keduanya meneliti dalam perspektif implementasi dan mencoba mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan, penelitian ini berbeda dari kedua penelitian tersebut, terutama dalam hal : a) pelaksanaan usaha ekonomi produktif dalam penelitian ini dilakukan oleh komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebuah komunitas yang tentu memiliki berbagai keterbatasan dan kekhususan tersendiri dibandingkan dengan komunitas masyarakat pada umumnya, b) tidak saja dalam perspektif pelaksanaan dan menemukan faktor pendorong/penghambat pelaksanaan, lebih dari itu penelitian ini mencoba bergerak kearah yang lebih mendalam dengan analisisnya pada

dampaknya bagi kelompok sasaran, yaitu : kelompok pelaku usaha ekonomi produktif tersebut.

Untuk komprehensifnya analisa dan pembahasan, judul penelitian ini adalah ” **Penguatan Ekonomi Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif Tiga Kelompok Usaha Bersama di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)**”

1.2. Perumusan Masalah

Untuk memberikan gambaran yang utuh tentang perumusan masalah penelitian ini, berikut akan uraikan secara singkat perkembangan penguatan ekonomi komunitas adat terpencil melalui pelaksanaan usaha ekonomi produktif di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Selama tahun 2007-2008 pelaksanaan usaha ekonomi produktif tersebut telah dilakukan pada 6 (enam) kelompok usaha bersama (kuba), dengan rincian masing-masing tiga kelompok per tahun anggaran, dimana tiga kelompok dilakukan pada tahun 2007, yaitu : usaha kerajinan anyaman oleh kelompok usaha bersama Bangun Banua, usaha jual beli sembako oleh kelompok usaha bersama Anggrek dan Merpati, dan tiga kelompok dilakukan pada tahun 2008, yaitu : usaha jual beli sembako oleh kelompok usaha bersama Serumpun, usaha jual beli beras oleh kelompok usaha bersama Maju Bersama, dan jual beli pupuk oleh kelompok usaha bersama Pelopor.

Dalam kenyataannya menurut Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2009) pelaksanaan usaha ekonomi produktif yang dilakukan tahun 2007 disimpulkan tidak berkembang dan mati, saat ini usaha ekonomi produktif tersebut sudah tidak ada aktivitas usaha yang dilakukan, hal ini disebabkan jenis usaha yang dilakukan tidak sesuai potensi setempat, diantaranya : usaha kerajinan anyaman (kuba Bangun Banua), ternyata bahan bakunya tidak tersedia di tempat, tetapi harus mendatangkannya dari luar desa, sehingga lambat laun kelompok ini kemudian tidak melakukan aktivitas

usahanya lagi, sedangkan jenis usaha sembako (kubeng Anggrek dan Merpati) tidak lagi melakukan aktivitas usaha disebabkan anggota kelompok tidak terbiasa melakukan kegiatan usaha secara berkelompok dan sebagian beralih fungsi menjadi usaha pribadi.

Khusus untuk pelaksanaan usaha ekonomi produktif tahun 2008, menurut informasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2009), sampai penelitian dilaksanakan belum ada laporan tertulis tentang perkembangan usaha ekonomi produktif kelompok-kelompok tersebut. Yang ada sebatas laporan penyerahan bantuan, besarnya dana untuk pelaksanaan tersebut, termasuk besarnya bantuan usaha yang diberikan, bahkan dalam laporan penyelenggaraan pembangunan akhir Desember tahun 2008 juga tidak ditemukan data perkembangan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tersebut, kondisi ini tentu memprihatinkan, bagaimana pemerintah dapat melihat terjadinya peningkatan pendapatan kelompok sasaran kalau perkembangannya saja tidak diketahui. Padahal pelaksanaan usaha ekonomi produktif adalah upaya sistematis dalam kaitannya dengan pemberdayaan komunitas adat terpencil agar mereka dapat meningkatkan pendapatan secara berkelompok sehingga mengurangi ketergantungan yang tinggi pada lingkungan alam tempat di mana mereka tinggal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mendidik kerjasama dan kebersamaan, transfer teknologi dan kemampuan, mendidik mereka jiwa wirausaha dan memberikan kemampuan kepada mereka agar dapat menjangkau berbagai akses pelayanan lain yang dibutuhkan komunitas tersebut agar dapat hidup layak dan sejahtera. Ketidaktahuan perkembangan pelaksanaan tentu membawa dampak serius terhadap pencapaian tujuan dilaksanakannya usaha ekonomi produktif sebagai upaya penguatan ekonomi komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara tersebut.

Melihat kondisi pelaksanaan usaha ekonomi produktif tahun 2007 tidak berkembang dan mati sementara tahun 2008 belum diketahui perkembangannya maka penelitian ini mendeskripsikan kondisi sebenarnya pelaksanaan usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil yang

diadakan pada tahun 2008. Adapun alasannya : a) pelaksanaannya relatif masih baru dan masih berlangsung sehingga peneliti relatif dapat melacak pelaksanaan usaha ekonomi produktif tersebut, baik ketika dimulai hingga perkembangannya sekarang, b) pelaksanaan usaha ekonomi produktif ini merupakan pemberdayaan KAT yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Disamping pelaksanaan usaha ekonomi produktif juga dideskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendorong/penghambat pelaksanaan serta dampak usaha ekonomi produktif tersebut bagi tiga kelompok usaha bersama (Serumpun, Maju Bersama dan Pelopor) pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung/penghambat pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga Kelompok Usaha Bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa

Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung/penghambat pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan informasi, referensi dan kajian bagi para pemerhati, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memahami pelaksanaan, faktor-faktor pendukung/penghambat pelaksanaan serta dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan ilmu-ilmu sosial pada umumnya, dan khususnya kajian pembangunan sosial tentang penguatan ekonomi komunitas adat terpencil melalui usaha ekonomi produktif.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penelitian lebih lanjut pada berbagai disiplin ilmu lainnya

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya bagi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam upaya perbaikan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada Komunitas Adat Terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Memberi masukan bagi praktisi yang menjalankan program usaha ekonomi produktif sebagai upaya penguatan ekonomi pada komunitas adat terpencil.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan, menemukan faktor pendukung/penghambat serta mengetahui dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama (Serumpun, Maju Bersama dan Pelopor) pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang sebagian besar data-datanya berwujud kata-kata bukan rangkaian angka-angka. Data/informasi tersebut dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 1992 : 15-16), sementara

menurut Sugiyono (2008 : 1) penelitian kualitatif sering disebut pula dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sedangkan studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2003 : 201).

Jadi penelitian ini dilakukan pada kondisi, lokasi dan waktu yang alamiah pada suatu kelompok masyarakat tertentu (kelompok usaha bersama Serumpun, Maju Bersama dan Pelopor) dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif, dimana sebagian besar datanya berwujud kata-kata, sedangkan analisis tetap menggunakan kata-kata, yang disusun ke dalam teks yang diperluas.

1.5.2. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif sebagaimana tersebut dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan, menemukan faktor pendukung/penghambat serta mengetahui dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Neuman (2006 : 35) "*descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, social setting or relationship*" (penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang terperinci tentang suatu situasi sosial, hubungan sosial atau *setting* sosial).

Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan Malo dan Sri Trisnoningtias (1994 : 27-28) bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam permasalahan penelitian, namun dirasa

belum memadai, penelitian ini biasanya untuk menjawab apa penjelasan yang lebih terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian.

Jadi, penelitian deskriptif dalam penelitian ini dipilih dengan maksud agar dapat memberikan gambaran yang terperinci tentang fenomena dari suatu kondisi/situasi sosial tertentu, yaitu : pelaksanaan, faktor pendukung/penghambat pelaksanaan serta dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

1.5.3. Lokasi dan Jangka Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kelompok usaha bersama pelaku usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil tahun 2008, yaitu : kelompok usaha bersama Serumpun, kelompok usaha bersama Maju Bersama dan kelompok usaha bersama Pelopor di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian antara lain :

- a. Ketiga kelompok usaha bersama tersebut melaksanakan usaha ekonomi produktif selama tahun 2008 sampai sekarang.
- b. Kelompok usaha bersama tersebut merupakan bagian komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Ketiganya menurut Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum diketahui perkembangannya, sehingga penelitian yang mendalam akan mengetahui secara komprehensif tingkat perkembangan pelaksanaan usaha ekonomi produktif masing-masing kelompok tersebut.

sedangkan jangka waktu penelitian lapangan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, yaitu mulai dari tanggal 23 Maret sampai 22 Mei tahun 2009. Jangka waktu tersebut tidak termasuk : penyusunan proposal penelitian, seminar proposal penelitian dan perbaikan, pengurusan ijin penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, seminar hasil penelitian dan perbaikan, pembuatan dan penyerahan laporan penelitian

1.5.4. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya : a) individu yang memahami dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil tersebut, b) individu yang memahami, memiliki keterkaitan dan terlibat secara tidak langsung dalam pelaksanaan usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan yang dipilih dibedakan atas dua kategori besar, yaitu : a) kelompok yang terlibat secara langsung, diantaranya : pemilik dan pelaksana program (Dinas Kessos dan PM Kab. HSS), pemilik wilayah kelompok sasaran program (Pemerintah Desa Hamak Utara), pelaksana pendampingan usaha ekonomi produktif (kelompok pendamping), pembina kelompok usaha bersama, pelaksana usaha ekonomi produktif (kelompok kube) dan b) kelompok yang terlibat secara tidak langsung, diantaranya : pemerintah kecamatan dan instansi pemerintah lain yang berkaitan erat dengan pembinaan usaha ekonomi produktif (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Hulu Sungai Selatan), usaha yang berkaitan dengan sektor pertanian (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Hulu Sungai Selatan) dan usaha yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan perkebunan (Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Hulu Sungai Selatan).

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara *snowball sampling*. *Non probability sampling* menurut Sugiyono (2008 : 53-54) adalah teknik pemilihan informan yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih, sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sample (informan) sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.

Penentuan sampel (informan) dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008 : 54) tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel (informan) yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Jadi penentuan sampel (informan) dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu (mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayatinya, atau mereka tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti).

Dalam penelitian ini, pemilihan informan yang peneliti lakukan diawali dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dari informan ini kemudian diperoleh informan yang memahami pelaksanaan uep tersebut, yaitu : Pejabat terdahulu (mantan) Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Ir), dan Kepala Bidang Pembinaan

dan Pemberdayaan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Sy). Dari informan Ir dan Sy, diperoleh informan selanjutnya yang juga terlibat dalam pelaksanaan uep, yaitu Pejabat terdahulu (mantan) Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (CA) dan Pelaksana kegiatan/staf Pembinaan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (MS).

Dari informan Sy dan MS juga diperoleh informan lain, yaitu : Kepala Desa Hamak Utara (RH) dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Hamak Utara (Ta), para pendamping (Az, RH, dan Ka), petugas lapangan pemberdayaan KAT (Na) dan kelompok pelaksana usaha ekonomi produktif (Serumpun, dengan ketua kelompok MA, Maju Bersama dengan ketua kelompok Ta, dan Pelopor dengan ketua kelompok Wa), selanjutnya dari informasi masing-masing ketua, peneliti terus mengumpulkan informasi dari masing-masing anggota, sampai informasi dianggap cukup.

Masih dari informasi Sy, juga diperoleh tambahan informan yang dianggap relevan dan mendukung informasi penelitian, yaitu dari Pejabat terdahulu (mantan) Camat Telaga Langsat (IF), Kasi Kesra Kecamatan Telaga Langsat (MT), Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RA), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (UP) dan Kepala TU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Hulu Sungai Selatan (CA).

Berikut daftar keseluruhan informan penelitian dan jenis informasi yang diperoleh sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jenis informasi dan informan penelitian

No	Informasi yang ingin diperoleh	Informan			Tanggal Wawan-cara
		Kelom-pok	Kedudukan /kode informan	Jlh	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang uep • Koordinasi dalam pelaksanaan uep • Kerjasama dalam pelaksanaan uep • Dukungan pelaksanaan uep 	Dinas Kessos Kab. HSS	Mantan Kepala Dinas Kessos & PM Kab.HSS/Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan (Ir)	1	09 April 2009
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan uep • Persiapan pelaksanaan uep • Pemberitahuan/sosialisasi • Pemilihan lokasi pelaksanaan uep • Pemilihan pendamping 	Dinas Kessos Kab. HSS	Mantan Kabid PPS Dinas Kessos & PM Kab.HSS (CA)	1	08 April 2009
3	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok sasaran pelaksanaan uep • Prosedur pelaksanaan uep • Dukungan/hambatan pelaksanaan uep di lokasi sasaran 	Dinas Kessos Kab. HSS	Mantan pelaksana kegiatan Dinas Kessos & PM Kab.HSS (MS)	1	07 April 2009
4	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dalam pelaksanaan uep 	Instansi terkait	Kepala TU Dinas Perindustrian, Perdagangan, UKM & Koperasi Kab.HSS (CA)	1	08 April 2009
5	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dalam pelaksanaan uep • Tanggapan penggunaan pupuk SP36 untuk pembekuan karet 	Instansi terkait	Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (UP)	1	29 April 2009

Tabel 1.1. (sambungan)

No	Informasi yang ingin diperoleh	Informan			Tanggal Wawancara
		Kelompok	Kedudukan /kode informan	Jlh	
6	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dalam pelaksanaan uep • Prospek sektor pertanian di lokasi KAT 	Instansi terkait	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RA)	1	29 April 2009
7	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam pelaksanaan uep • Dukungan pelaksanaan uep 	Kecamatan	Mantan Camat Telaga Langsat/Camat Padang Batung (IF)	1	13 April 2009
8	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dalam pelaksanaan uep 	Kecamatan	Kepala seksi kesra Kecamatan Telaga Langsat (MT)	1	13 April 2009
9	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dalam pelaksanaan uep • Keterlibatan/dukungan dalam pelaksanaan uep 	Pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala desa Hamak Utara (RH) • Ketua Badan Permusyawaratan Desa Hamak Utara (Ta) 	2	17 April 2009
10	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan pendamping • Kompetensi dan pelatihan pendamping • Peranan pendamping untuk membentuk kerjasama 	Non-pemerintah	Petugas lapangan pemberdayaan KAT/Pembina kube (Na)	1	01 Mei 2009

Tabel 1.1. (sambungan)

No	Informasi yang ingin diperoleh	Informan			Tanggal Wawancara
		Kelompok	Kedudukan /kode informan	Jlh	
11	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan pendamping • Kompetensi pendamping • Dukungan pemerintah dalam pendampingan • Peran dalam sosialisasi • Peran dalam pembentukan kelompok • Peran dalam pelaksanaan usaha • Peran dalam administrasi pengelolaan usaha • Penghambat pendampingan • Dampak pelaksanaan uep 	Non-pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendamping kube serumpun (Az) • Pendamping kube maju bersama (RH) • Pendamping kube pelopor (Ka) 	3	30 April 2009
12	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pemilihan usaha • Pelaksanaan usaha • Administrasi pengelolaan usaha • Faktor pendukung /penghambat pelaksanaan uep • Dampak pelaksanaan uep 	Non-pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua kube serumpun (MA) • Ketua kube maju bersama (Ta) • Ketua kube pelopor (Ma) 	3	17 April 2009

Tabel 1.1. (sambungan)

No	Informasi yang ingin diperoleh	Informan			Tanggal Wawancara
		Kelompok	Kedudukan /kode informan	Jlh	
13	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang pemilihan usaha • Pelaksanaan usaha • Administrasi pengelolaan usaha • Faktor pendukung/penghambat pelaksanaan uep • Dampak pelaksanaan uep 	Non pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota kube serumpun (Am dan Mr) • Anggota kube maju bersama (Ar dan As) • Anggota kube pelopor (Sa dan Mt) 	6	Kube Serumpun 21 April 2009 Kube Maju Bersama 22 April 2009 Kube Pelopor 23 April 2009
	Jumlah			23	

Sumber : telah diolah kembali

1.5.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Kajian kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang akan berguna dalam memberikan wawasan dan pemahaman dasar kerangka pemikiran ataupun definisi konseptual serta pendapat para pakar, baik diambil dari : buku, jurnal, bahan elektronik dan lain sebagainya, khususnya tentang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan usaha kecil, serta komunitas adat terpencil, selain itu juga dilakukan telaah dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, berupa : peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksana, dokumen, laporan dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.
- b. Wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih melalui *snowball sampling*. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung dengan

bercakap-cakap, bertatap muka, dalam suasana santai dan memberi keleluasan kepada informan untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya tentang pelaksanaan usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara bebas tak berstruktur, mendalam dan bersifat "open ended" atau berujung terbuka, dimana jawaban tidak hanya terbatas pada satu tanggapan. Alat bantu wawancara ini adalah pedoman wawancara tak berstruktur.

- c. Observasi. Observasi dilakukan, baik terhadap individu (informan), kelompok dalam melakukan usaha ekonomi produktif, interaksi antar kelompok dan komunitas, kondisi alam dan potensi setempat, serta kegiatan-kegiatan lain yang relevan dengan penelitian. Terhadap beberapa obyek observasi juga dilakukan pengabadian melalui media foto untuk menggambarkan citra tak bergerak kelompok dan situasi sasaran penelitian. Foto-foto tersebut juga diharapkan dapat memperkaya data yang diperoleh melalui wawancara. Alat bantu observasi adalah pedoman observasi penelitian dan kamera.

Waktu pengumpulan data kajian kepustakaan dan dokumentasi, khususnya yang berkaitan dengan data sekunder berlangsung selama penelitian, yaitu sejak 23 Maret sampai dengan 22 Mei 2009, wawancara dilakukan selama rentang waktu 7 April sampai dengan 1 Mei 2009, sedangkan observasi dilakukan dalam rentang waktu 1 April sampai dengan 10 Mei 2009. Observasi yang dilakukan diantaranya terhadap : perilaku anggota kube, pendamping, dan pelaksana program serta pihak-pihak yang terkait, kegiatan usaha ekonomi produktif ketiga kube, kegiatan keseharian anggota dan kelompok serta pendamping, interaksi sesama anggota, aparat desa, tokoh setempat serta komunitas secara umum, kondisi potensi dan lingkungan alam setempat dan lain-lain yang relevan dengan penelitian.

1.5.6. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data mentah, tahap ini dilakukan melalui kajian dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, wawancara dengan informan dan observasi lapangan. Pada tahap ini dilakukan pencatatan-pencatatan secara apa adanya, baik melalui tulisan, *tape recorder* maupun kamera. *Output* pengumpulan data mentah ini berupa : catatan hasil wawancara dan observasi, kaset rekaman sebagai hasil perekaman melalui *tape recorder* sebanyak 8 buah, dan foto yang diambil melalui *pocket camera* dan *handphone* Nokia sebanyak 112 buah.
- b. Transkrip data, tahap ini data mentah yang berhasil diperoleh kemudian dirubah ke dalam bentuk tertulis (baik yang berasal dari catatan tulisan tangan maupun *melalui tape recorder*). Begitu juga dengan hasil foto yang berasal dari kamera dituliskan isi obyek yang terekam oleh kamera dan *handphone* tersebut. Kesemua transkrip data tersebut ditulis seperti apa adanya, dan dilakukan segera setelah wawancara dan observasi dilakukan. Pekerjaan ini cukup melelahkan, khususnya pada hasil kaset rekaman, dimana dalam transkrip harus dilakukan dengan mendengarkannya secara berulang-ulang.
- c. Pembuatan *koding*. Tahap ini merupakan kegiatan membaca secara hati-hati dan teliti seluruh data yang sudah ditranskrip Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip yang dilakukan diupayakan untuk menemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya. Dari hal-hal penting tersebut kemudian diambil "kata kunci"nya, dimana kata kunci tersebut akan diberi kode. Beberapa diantaranya, kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pelaksana, proses/tahapan pelaksanaan usaha ekonomi produktif, koordinasi, variasi usaha, pendamping, kompetensi, pendampingan, kebiasaan, norma, perilaku, interaksi, komunikasi, dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.
- d. Kategori data, pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan "kategori". Kategori yang digunakan sebagai satu besaran utama dikelompokkan dalam : pelaksanaan, faktor

pendukung dan penghambat dan dampak usaha ekonomi produktif bagi tiga kube tersebut.

- e. Penyimpulan sementara, pada tahap dilakukan pengambilan kesimpulan sementara berdasarkan data yang ada, baik data yang berasal dari wawancara, observasi maupun telaah dokumen. Penyimpulan sementara ini dilakukan setelah membaca dan menelaah secara berulang dan mendalam, dan untuk memudahkan penyimpulan tersebut dilakukan dengan membuat matrik gambar dan tabel ringkasan hasil sementara.
- f. Triangulasi, tahap ini adalah kegiatan untuk mengecek secara berulang (*check* dan *recheck*) antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Triangulasi yang dilakukan, baik dalam hal sumber data, metode maupun teori. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang (seperti : anggota kelompok, ketua kelompok, pendamping, pembina kube, aparat pemerintah desa, kecamatan dan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun instansi terkait lainnya) dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (DPA-SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, laporan-laporan pelaksanaan usaha ekonomi produktif, proposal kelompok, dan sebagainya), sementara, triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara : pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data (*cross check* hasil penelitian melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut, kajian literatur dan dokumentasi, wawancara dan observasi) dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data (berbagai informan, data dokumen, dan hasil observasi serta foto) dengan metode yang sama, sedangkan triangulasi teori berarti mencari keterkaitan data dengan teori. Konsep yang dijadikan rujukan diantaranya : kesejahteraan sosial,

pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan usaha kecil serta komunitas adat terpencil.

- g. Penyimpulan akhir, dilakukan karena data dianggap sudah jenuh (*saturated*), dimana ketika penambahan data baru dari anggota ketiga kube justru membuat ketumpangtindihan (*redundant*). Akhirnya, sebelum mengambil kesimpulan akhir, berbagai data dan temuan dikaji kembali secara berulang, diverifikasi selama penelitian berlangsung, hingga akhirnya sampai pada kesimpulan akhir.

Untuk menjamin derajat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, dalam penelitian ini standar yang digunakan adalah : a) dapat dipercaya (*credibility*), dicapai dengan jalan mengumpulkan data seobyektif mungkin dan selengkap mungkin, b) keteralihan (*transferability*). Langkah ini dicapai dengan menguji kesimpulan di tempat lain yang serupa dengan konteks penelitian ini. Jika kesimpulan ini juga berlaku di konteks lain maka tercapailah ciri *transferability*, c) ketergantungan (*dependability*). Hal ini dapat dicapai jika penelitian yang sama dilakukan beberapa kali dan tetap menghasilkan kesimpulan yang sama (*similar*). Konsep ini setara dengan "reliabilitas" dalam penelitian kuantitatif. Hal ini dengan memperbandingkannya dengan penelitian terdahulu yang relatif serupa dan d) kepastian (*confirmability*), dalam penelitian ini merujuk pada obyektivitas penelitian, yang sandaran utamanya berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan atau "obyektif" seperti apa adanya di lapangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini mengikuti sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, didalamnya membahas tentang latar belakang yang berisi gambaran umum kondisi komunitas adat terpencil, pemberdayaan yang telah, sedang dan belum dilaksanakan, pelaksanaan usaha ekonomi produktif yang telah dilaksanakan pada komunitas adat terpencil dan permasalahannya, selain itu juga diuraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Hal lain yang terangkum dalam pendahuluan ini juga menguraikan penggunaan metode

penelitian (pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, gambaran teknik pemilihan informan, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang digunakan dalam membahas hasil temuan lapangan) serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, didalamnya membahas tentang konsep, pendapat yang dikemukakan para pakar, ahli dan praktisi serta kebijakan, baik melalui buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, maupun sumber lainnya, yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan usaha kecil, serta komunitas adat terpencil. Pada bagian akhir bab ini digambarkan sistematika model penelitian yang digunakan.

Bab 3 Berisi gambaran umum lokasi penelitian, Komunitas Adat Terpencil Desa Hamak Utara, dan gambaran umum usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil tersebut.

Bab 4 Temuan Lapangan berisi uraian pelaksanaan, faktor-faktor pendukung/penghambat serta dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara.

Bab 5 Pembahasan, analisa peneliti mengkaitkan konsep, pendapat ahli dengan pelaksanaan, faktor pendukung/penghambat, dan dampak usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara.

Bab 6 Kesimpulan dan Saran. Pada kesimpulan didalamnya diuraikan secara singkat tentang pelaksanaan, faktor pendukung/penghambat serta dampak pelaksanaan usaha ekonomi produktif bagi tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara. Dengan simpulan tersebut kemudian direkomendasikan perbaikan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tersebut di masa yang akan datang.